

**ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN PEMINDAHAN IBU  
KOTA PADA PEMERINTAHAN PRESIDEN SBY DAN PRESIDEN  
JOKOWI PADA MEDIA ONLINE KOMPAS.COM**



**Disusun sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Strata I  
pada Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi dan Informatika**

**Oleh:**

**HAEDAR SYAMSU JUNIARDI**

**L100160138**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Analisis Framing Pemberitaan Pemindahan Ibu Kota pada Pemerintahan Presiden  
SBY dan Presiden Jokowi pada Media Online Kompas.com**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh:

**HAEDAR SYAMSU JUNIARDI**

**L100160138**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh

Dosen

Pembimbing



**Agus Triyono, M.Si**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Analisis Framing Pemberitaan Pemindahan Ibu Kota pada Pemerintahan Presiden  
SBY dan Presiden Jokowi pada Media Online Kompas.com**

**PUBLIKASI ILMIAH**

**OLEH:**

**HAEDAR SYAMSU JUNIARDI**

**L100160138**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Komunikasi dan Informatika  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Selasa, 15 Desember 2020  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

**Dewan Penguji :**

- 1. Agus Triyono, M.Si  
(Ketua Dewan Penguji)**
- 2. Budi Santoso, M.Si  
(Anggota I Dewan Penguji)**
- 3. Pundra Rengga Andhita, M.Si  
(Anggota II Dewan Penguji)**

(.....)  
(.....)  
(.....)



## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 13 Desember 2020

Penulis



**HAEDAR SYAMSU JUNIARDI**

**L100160138**

# **ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN PEMINDAHAN IBU KOTA PADA PEMERINTAHAN PRESIDEN SBY DAN PRESIDEN JOKOWI PADA MEDIA ONLINE KOMPAS.COM**

## **Abstrak**

Media memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi terkait hal-hal yang menyangkut kebijakan pemerintah untuk rakyat. Mereka juga memiliki tugas untuk menyampaikan hal tersebut secara aktual, faktual, dan berimbang. Meskipun begitu, media memiliki agendanya tersendiri untuk menampilkan fakta-fakta apa yang terjadi, dan hal-hal yang menyangkut fakta tersebut. Mereka memiliki kapasitas untuk menampilkan fakta tersebut sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kompas.com sebagai media yang cukup besar di Indonesia, membingkai isu terkait dengan pemindahan ibu kota yang telah digagas oleh dua presiden yang berbeda, pada masa pemerintahan yang berbeda, yaitu SBY dan Jokowi. Penelitian ini menggunakan metode analisis framing model Gamson dan Modigliani. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kompas.com dalam membingkai isu pemindahan ibu kota negara, yang digagas oleh presiden yang berbeda, yaitu SBY dan Jokowi, menunjukkan bingkai yang berbeda pula. Kompas.com terbukti lebih berpihak kepada Jokowi dalam gagasannya memindahkan ibu kota.

**Kata Kunci:** Analisis Framing, Pemberitaan, Media Online

## **Abstract**

Media has a function to fulfill the public's need for information related to government policies for the people. They also have a responsibility to convey this matter in an actual, factual, and equitable. Even so, the media has its own agenda to present the facts of what happened, and matters relating to these facts. They have the capacity to present these facts as they want. This study aims to find out how Kompas.com, as a large media in Indonesia, frames the issue related to the moving of the capital that has been initiated by two different presidents, during different government periods, namely SBY and Jokowi. This study uses the Gamson and Modigliani framing analysis method. The results of this study indicate that Kompas.com in framing the issue of moving the country's capital city, which was initiated by different presidents, namely SBY and Jokowi, shows a different frame. Kompas.com proved to be stand on Jokowi in his idea of moving the capital city.

**Keywords:** Framing Analysis, News, Online Media

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kabar mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia cukup mengagetkan banyak pihak. Langkah ini dilakukan oleh Presiden Jokowi pada akhir masa jabatannya, yang juga akan dilanjutkan olehnya pada periode 2019-2024. Pemindahan Ibu Kota

Negara Republik Indonesia resmi diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal, 26 Agustus 2019 dengan lokasi baru yaitu Kabupaten Penajem Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kusuma, 2019). Wacana mengenai pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia sudah muncul sejak masa Pemerintahan Hindia-Belandan, oleh jenderal Deandels yang menganggap bahwa Batavia (yang sekarang adalah Jakarta) adalah kawasan yang kurang tepat dari segi kelayakan dan pertahanan untuk dijadikan Ibukota. Namun gagasan itu kandas ditengah jalan, dan dimunculkan kembali oleh Soekarno, yang menggagas Palangkaraya sebagai ibu kota negara yang dianggapnya sebagai tempat yang suci, mulia, dan agung. Saat pemerintahan Soeharto, muncul wacana kembali mengenai pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Bogor. Hingga pada masa Pemerintahan SBY, muncul kembali dan telah dibentuk tim khusus. Tetapi tidak adanya kejelasan mengenai hasil kajian secara menyeluruh, maka wacana tersebut kembali gagal hingga yang pada akhirnya dicetuskan lagi oleh Presiden Jokowi (Novellino, 2019).

Semenjak gagasan ini dicetuskan, banyak pro dan kontra yang muncul dari kalangan masyarakat hingga para pejabat negara. Perdebatan mulai terjadi mengenai berapa total anggaran yang dibutuhkan oleh pemerintah, hingga wajah Kota Jakarta kedepannya. Perdebatan dan statement-statement yang bermunculan tentunya tak luput dari liputan berbagai media. Bahkan berita mengenai dampak yang terjadi dari pemindahan ibu kota ini masih beredar luas hingga 15 September 2019 di laman Republika.com, Kompas.com, cnnindonesia.com, dan Liputan6.com. Langkah yang diambil oleh Presiden Jokowi ini tentu cukup menyita perhatian sebagian besar masyarakat yang kemudian membuat media-media cetak maupun online menjadi berlomba-lomba untuk melaporkan kabar terkini, terkait dengan pemindahan lokasi Ibu Kota Indonesia, salah satunya Kompas.com, yang sejak 26 Agustus hingga tanggal 17 Oktober 2019 telah mengeluarkan kurang lebih 300 berita terkait dengan pemindahan ibu kota. Hal ini juga terbukti pada bulan Agustus 2019, hashtag #ibukotabaru digunakan sebanyak 32.100 kali dan disukai oleh kurang lebih 3000 pengguna Twitter.



Gambar 1 Jumlah hashtag #ibukotabaru di Twitter tahun 2019

Dari penjabaran di atas, peneliti menganggap bahwa tema ini penting diangkat untuk melihat bagaimana sikap media di Indonesia dalam memberitakan tentang keputusan pemindahan ibu kota, yang dilakukan oleh dua presiden yang berbeda dan di masa pemerintahan yang berbeda. Alasan mengapa Kompas dipilih menjadi media yang diteliti adalah, karena penelitian ini mengambil sampel berita di masa yang berbeda yaitu masa pemerintahan SBY dan juga masa pemerintahan Jokowi. Didapati dari observasi yang telah peneliti lakukan sebelumnya, hanya media Kompas.com yang memberitakan isu pemindahan ibu kota pada masa pemerintahan SBY secara masif pada tahun 2013 tersebut. Yaitu lebih banyak secara kuantitas dibandingkan dengan media yang lain.

Media massa, dimana isi pesan itu dibuat adalah sebuah penghubung proses dengan tujuan mengembangkan dan membahas dirinya, yang mana merupakan sebuah proses mediasi (Morissan, 2013). Tugas dan fungsi pers adalah memenuhi kebutuhan khalayak akan informasi melalui medianya entah cetak maupun elektronik. Pers akan memberitakan sesuatu yang baru saja terjadi, atau hal-hal yang masih menjadi wacana, dimana hal tersebut penting untuk masyarakat (Budyatna dalam Setiawan, 2011). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Kompas.com, sebagai salah satu media massa membingkai suatu pemberitaan mengenai Pemindahan Ibu Kota pada

Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Jokowi pada Media Online Kompas.com. Peneliti mengambil momentum tersebut dikarenakan, pada era Jokowi, Jokowi menjamin kebebasan pers dan tidak untuk meragukannya

(Nursyabani, 2019) dan pada era SBY telah dibentuk tim khusus, namun pemberitaan terdengar negatif dikarenakan dianggap reaktif (Rudi, 2013).

Pembingkaiannya suatu berita oleh sebuah media dapat disebut juga dengan framing (Sobur dalam Kriyantono, 2006). Penelitian ini penting untuk dilakukan karena framing berakibat pada keberpihakan di salah satu sisi, sehingga dapat diketahui perspektif seperti apa yang dimiliki dan digunakan oleh suatu media dalam memberitakan satu topik.

Beberapa model dalam analisis framing, antara lain dari Murray Edelman, Robert N. Entman, dan William A. Gamson. Pada dasarnya, analisis framing menanyakan mengapa sebuah peristiwa diberitakan daripada yang lain, mengapa hanya fakta-fakta tertentu yang diungkap? Mengapa pemberitaan bisa memiliki sudut pandang yang berbeda, padahal beritanya sama? (Kriyantono, 2006). Framing didasarkan pada beberapa bagian berita, yaitu pada judul berita, inti berita dan penutup. Ketiganya akan berkaitan untuk kemudian menciptakan sikap pembaca dalam bentuk empati, konsekuensi dari isu yang diangkat, dan sebuah kesimpulan akhir yang dibentuk pada berita tersebut (Sobur dalam Damayanti, 2011). Salah satu konsep framing adalah yang dipaparkan oleh William Gamson dan Andre Modigliani. Model ini memiliki anggapan bahwa suatu wacana yang ada pada sebuah peristiwa dapat dimaknai karena terdiri dari gugusan ide-ide yang disusun dengan sedemikian rupa, dalam konsep ini, dikenal sebuah istilah yaitu "*package*". *Package* ini dapat diartikan sebagai cara pandang, yang memiliki rangkaian ide yang menunjukkan sebuah isu dan peristiwa yang relevan (Kriyantono, 2006).

Peneliti mengacu pada penelitian terdahulu, penelitian pertama merupakan hasil dari Abdurrahman Jemat (2014), dengan judul *Framing Media Online Terhadap Pemberitaan Mengenai Susilo Bambang Yudhoyono Menjelang Pemilu Legislatif*. Penelitian ini menggunakan metode analisis framing model Gamson dan Modigliani. Dalam penelitian tersebut Kompas merepresentasikan SBY sebagai ketua partai yang cenderung curang dalam pemberitaan terkait isu penyalahgunaan uang negara oleh Presiden.

Penelitian selanjutnya milik Ghanes Eka Putera (2014) yang berjudul *Bingkai Media Terhadap Pemberitaan Capres Jokowi pada Pilpres 2014*. Penelitian ini menganalisa tentang pengemasan pemberitaan mengenai citra calon presiden Jokowi



pada media online Kompas.com dan Detik.com dengan metode analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Kompas.com secara tidak langsung berpihak pada Jokowi. Hal tersebut dapat dilihat dari berita-berita yang dikeluarkan oleh Kompas.com didominasi oleh berita-berita yang positif. Jokowi dinilai sebagai sosok yang bersahaja, agamis, merakyat, dan sederhana.

Penelitian ketiga yang menjadi acuan penulis adalah penelitian milik Nurul Khotimah (2019) berjudul *Tantangan Independensi Media dalam Pemilu : Kasus Kompas.com*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Kompas.com dalam memberitakan aksi kampanye akbar yang digelar oleh para capres dan cawapres pada pemilu 2019 tidak berimbang karena masih cenderung berpihak pada pasangan urutan nomor satu yaitu Jokowi dan Ma'ruf Amin.

## **1.2. Tujuan Penelitian dan Rumusan Masalah**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana Kompas.com membingkai pemberitaan mengenai Pemindahan Ibu Kota pada Pemerintahan Presiden SBY dan Presiden Jokowi pada Media Online Kompas.com. Karena dari *research* yang sudah dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa Kompas.com cukup masif dalam memberitakan pemberitaan tentang pemindahan ibu kota bahkan sejak masih berwujud wacana pada masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hingga sudah diresmikan pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2019 ini. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan peneliti, Kompas.com dalam memberitakan pemindahan ibu kota, setidaknya dapat mengeluarkan hingga 3 berita dalam satu minggu, atau bisa satu kali dalam satu hari.

## **1.3. Teori Terkait**

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang dan tujuan penelitian diatas, berikut ini teori-teori yang akan digunakan oleh peneliti sebagai dasar acuan dalam penelitian :

### **1.3.1 Framing Media**

Framing merupakan pembingkai terhadap suatu peristiwa. Framing digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang tersebut pada akhirnya mempengaruhi bagaimana kemudian suatu berita disajikan dan ditentukan kemana arahnya. Framing

digunakan untuk mengkaji pembingkai realitas yang dilakukan media. Dimana didalamnya terdapat proses representasi dan rekonstruksi dari sebuah realitas yang ada. Framing berakibat pada berat sebelah, dalam artian, hanya ada satu sisi yang ditonjolkan dari pada yang lain, yang pada akhirnya hal yang ditonjolkan tersebut dianggap lebih penting, lebih bermakna . (Sobur dalam Kriyantono, 2006).

Robert N. Entman mengatakan bahwa meskipun framing dapat digunakan pada berbagai bidang studi, hal yang paling mendasari dan menjadikannya berkaitan adalah bagaimana sebuah naskah komunikasi itu ditampilkan, diperlihatkan bagian-bagian yang telah dipilih untuk ditonjolkan, dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi khalayak (Eriyanto Sodikin, 2018). Bingkai juga dimaknai sebagai suatu presentasi, interpretasi dan pola kognisi, yang di dalamnya terdapat penekanan, penonjolan, serta proses pemilihan, yang dilakukan secara kontinu. Maka ketika bingkai ini muncul, ia juga akan memunculkan sebuah struktur sosial yang baru, yang meliputi tindakan individu hingga tindakan sosial masyarakat luas (Gitlin dalam Carter, 2013).

Pembingkai berita ini diwujudkan melalui penggunaan simbol-simbol di dalam sebuah teks berita, yang pada akhirnya turut bisa mempengaruhi maknanya. Simbolisme ini merupakan aspek penting yang harus dilakukan demi bisa diwujudkannya sebuah bingkai. Banyak penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, yang memperlihatkan bagaimana sebuah simbol dapat mempengaruhi khalayak ramai melalui analisis framing. Banyak hal-hal tersirat yang ada dalam sebuah teks berita, yang kemungkinan hanya diperlihatkan sebagian saja maknanya, selebihnya diperlihatkan secara tersirat secara simbolis (Reese dalam Carter, 2013).

Framing model Gamson dan Modigliani juga sepakat bahwa makna dari sebuah teks berita dihasilkan dengan cara menggabungkan simbol-simbol dengan realitas budaya, yang juga dipelopori oleh prinsip-prinsip sebuah organisasi (Reese dalam Carter, 2013). Lebih lanjut lagi, framing dapat dikatakan berbeda dengan pembentukan sugesti. Ia dilakukan dengan cara menyentuh aspek-aspek psikologis, dengan mempengaruhi suatu pemikiran populer, yang berkaitan dengan kepentingan publik melalui penyampaian pesan dengan simbol-simbol tertentu (Carter, 2013).

### 1.3.2 Teori Konstruksi Sosial Realitas

Teori ini mempercayai ide mengenai pembentukan realitas sosial yang dihasilkan dari adanya interaksi antar manusia. Teori ini juga berpendapat bahwa orang-orang dengan

latar belakang yang sama akan memiliki penilaian yang sama terhadap suatu hal, pertukaran makna yang terjadi di antara orang-orang tersebut juga bersifat konstan (Morissan, 2013).

Dunia sosial adalah dunia yang dibentuk oleh individu-individu yang berinteraksi secara linguistik dan juga menggunakan aktivitas simbolik, dengan tujuan membentuk sebuah koherensi dan eksistensi manusia. Ide, makna, dan bahasa yang timbul dari tindakan manusia membentuk masyarakat itu sendiri dan bersifat dinamis (Parton, 2008). Teori konstruksi realitas menganggap bahwa manusia sebenarnya tidak dapat memaknai sebuah realita dengan sempurna, melainkan hanya melihat sebagai “*perceived reality*”, atau realitas yang sudah dipersepsikan terlebih dahulu, atau merupakan hasil dari konstruksi yang telah diciptakan oleh pihak lain (Berger dan Luckmann dalam Putra, 2012).

Dalam teori ini dijelaskan, bahwa individu dapat dipengaruhi oleh “*significant others*” dalam mempersepsikan suatu realita. Yaitu orang-orang yang mereka anggap berpengaruh dalam hidup serta yang mereka jadikan idola, panutan, atau bahkan orang yang dipercaya. Hal lain seperti pengalaman hidup dan juga dinamika sosial pada latar belakang seseorang, juga turut mempengaruhi proses konstruksi dari sebuah realita pada individu tersebut (Putra, 2012).

Ada dua maca realita yang dibedakan, menurut teori ini. Yang pertama adalah *objective reality*, yaitu realita yang ada diluar fisik manusia, yang mana realita tersebut hanya mampu dikonstruksikan saja oleh manusia. Realita yang sudah dikonstruksikan inilah yang kemudian disebut sebagai *subjective reality* (Putra, 2012).

Sebagai realitas objektif, masyarakat menunjukkan adanya proses eksternalisasi yang merupakan sebuah awal dari institusionalisasi. Eksternalisasi ini kemudian membentuk sebuah pola kebiasaan yang terjadi secara berulang dan kontinu, sehingga membentuk sebuah tradisi. Sedangkan masyarakat sebagai realitas subjektif adalah sebuah organisasi sosial, dimana realitas objektif dimaknai secara subjektif oleh masing-masing individu. Hal inilah yang kemudian mendorong adanya penerimaan terhadap definisi atau realitas-realitas baru, yang hadir dalam sosialisasi, dan dimaknai sebagai proses internalisasi (Sulaiman, 2016).

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan dengan pendekatan kualitatif, penelitian akan lebih berfokus pada kualitas dari hasil penelitian, yang mana dihasilkan dari analisis data yang dilakukan secara mendalam. Analisis data menggunakan analisis framing model Gamson dan Modigliani. Model ini menganggap bahwa frame sebagai cara bercerita atau gugusan beberapa ide yang memiliki susunan tertentu, yang kemudian menghadirkan konstruksi makna dari peristiwa yang berkaitan dengan suatu wacana. Berikut ini kerangka dari penerapan model Gamson dan Modigliani (Kriyantono, 2006)

Tabel 1. Unit Analisis Teori Framing Model Gamson & Modigliani

<b>Frame (media package)</b> Yaitu seerangkat gagasan atau ide sentral saat seseorang atau sebuah media akan memahami dan memaknai tentang suatu isu	
<b>Framing devices</b> Berkaitan langsung dengan ide sentral atau bingkai yang ditekankan dalam teks	<b>Reasoning Devices</b> Berhubungan dengan kohesi dan koherensi dari teks yang merujuk pada gagasan tertentu
<b>Methapors</b> Perumpamaan atau pengandaian	<b>Roots</b> Analisis kausal atau sebab akibat
<b>Catchphrase</b> Frase yang menarik, kontras, menonjol dalam suatu wacana	<b>Appeals to principle</b> Premis dasar, klaim-klaim moral
<b>Exemplar</b> Mengaitkan bingkai dengan contoh, ataupun teori yang akan menguatkan penjelasan	<b>Consequences</b> Efek yang didapat dari bingkai
<b>Depiction</b> Penggambaran atau pelukisan suatu isu yang bersifat konotatif.  <b>Visual images</b> Gambar, grafik, citra yang mendukung bingkai secara keseluruhan	

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh berita tentang pemindahan Ibu Kota Indonesia ke Kalimantan Timur pada tahun 2019 oleh Jokowi, dan pemindahan Ibu Kota Indonesia oleh Presiden SBY pada tahun 2013 di Kompas.com. Pemilihan data dilakukan pada pemberitaan di tahun yang berbeda, yaitu menggunakan teknik

sampling purposive, dimana sampel pertama adalah 8 berita dengan keyword “Pemindahan Ibu Kota Tahun 2013”, dan sampel kedua adalah 9 berita “Pemindahan Ibu Kota Indonesia” di website Kompas.com dengan periode 1 Januari hingga 30 September 2013 dan 26 Agustus 2019 hingga 14 September 2019. Berita yang dipilih untuk menjadi sampel dari penelitian ini adalah berita dari Kompas.com yang menampilkan bagaimana tanggapan dari tokoh-tokoh nasional dan masyarakat mengenai kabar pemindahan ibu kota.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode dokumentasi. Data yang didokumentasikan dalam penelitian ini adalah kumpulan berita mengenai pemindahan Ibu Kota Indonesia ke Kalimantan Timur pada periode 26 Agustus 2019 hingga 14 September 2019, dan Pemindahan Ibu Kota Indonesia oleh Presiden SBY di Kompas.com periode 1 – 30 September 2013. Peneliti juga akan mengambil informasi sekunder mengenai profil dari Kompas.com dan literasi-literasi yang terkait dengannya.

Tabel 2. Sebaran Judul Berita

No.	Judul	Tanggal Terbit
1	Pemindahan Ibu Kota "Still Long Way To Go"	28 Agustus 2012
2	Menko Perekonomian Tidak Setuju Ibu Kota Dipindah	22 Januari 2013
3	Wakil DPRD DKI : Pemindahan Ibu Kota Tepat, tapi Belum Waktunya	10 September 2013
4	JK Kritik Wacana Presiden Pindahkan Ibu Kota	10 September 2013
5	Anggota DPR : Pemindahan Ibu Kota PR untuk Presiden Selanjutnya	10 September 2013
6	Hidupkan Lagi Wacana Pindah Ibu Kota, SBY Serius atau Reaktif Saja?	12 September 2013
7	SBY Munculkan Kembali Wacana Pemindahan Ibu Kota	12 September 2013
8	Provinsi-provinsi Ini Siap Sediakan	7 Mei 2019

	Lahan untuk Pemindahan Ibu Kota	
9	Prabowo Sebut Pemindahan Ibu Kota Bagian dari Perjuangan Gerindra	17 Agustus 2019
10	Pemindahan Ibu Kota Negara di Mata Anies dan Para Mantan Gubernur DKI	28 Agustus 2019
11	Ketua Komisi II Optimistis Regulasi Pemindahan Ibu Kota Selesai 2019-2024	26 Agustus 2019
12	DPR Bentuk Pansus Pengkajian Pemindahan Ibu Kota	16 September 2019
13	Badan Otoritas untuk Pemindahan Ibu Kota Bakal Dipimpin Profesional	15 November 2019
14	Buka HPN 2020, Jokowi Kembali Tegaskan Ibu Kota Baru Tak Akan Rusak Lingkungan	8 Februari 2020
15	Bappenas Bantah Pemindahan Ibu Kota Hanya untuk Kepentingan Pemilu	11 Februari 2020
16	Bappenas: Ibu Kota Baru Akan Dibangun Layaknya Manhattan	11 Februari 2020

Dari data yang telah terkumpul, dilakukan analisis menggunakan analisis framing yang menekankan penonjolan kerangka pemikiran serta perspektif atau konsep dalam rangka memaknai objek wacana, yang kemudian hasil analisis tersebut divalidasi dengan triangulasi sumber data. Yaitu dengan mencocokkan latar belakang lembaga atau ideologi yang dianut Kompas.com dan juga pemingkai berita yang dilakukan oleh Kompas.com.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Media dalam memaparkan sebuah berita tentu berdasar kepada perspektifnya masing-masing. Hal ini juga tak luput dari tujuan media dalam membentuk sebuah bingkai media dengan harapan, efek yang dihasilkan akan sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Kompas.com dalam hal ini tentu turut mengikut sertakan perspektifnya dalam membingkai berita tentang pemindahan ibu kota yang dilakukan oleh Susilo Bambang

Yudhoyono dan oleh Jokowi, pada masing-masing masa pemerintahannya. Berikut ini analisis framing media Kompas.com dalam membingkai dua peristiwa tersebut.

### **3.1 Hasil Penelitian**

#### **3.1.1 Pemindahan Ibu Kota oleh SBY adalah Tindakan Reaktif!**

##### *a. Central Idea*

Media Kompas.com menganggap bahwa tindakan yang dilakukan oleh SBY merupakan tindakan yang reaktif yang mana hanya karena kunjungan ke sebuah negara yang berhasil memindahkan ibu kotanya, kemudian ia mencuatkan wacana tersebut. Hal ini juga didukung dengan adanya kritikan dari beberapa tokoh nasional. Seperti pada berita yang diterbitkan oleh Kompas.com dengan judul “*JK Kritik Wacana Presiden Pindahkan Ibu Kota*” pada tanggal 10 September 2013, dan juga “*Hidupkan Lagi Wacana Pindah Ibu Kota, SBY Serius atau Reaktif Saja?*” pada tanggal 12 September 2013. Bahkan dalam setiap pemberitaan mengenai pemindahan ibu kota, selalu diakhiri dengan paragraf penjabar bahwa SBY mencuatkan ide untuk melakukan pemindahan ibu kota setelah berkunjung ke Astana.

##### *b. Metaphors*

Sejak usulan mengenai pemindahan ibu kota negara disampaikan oleh SBY, Kompas menganggap bahwa pemindahan ibu kota yang diusulkan olehnya hanya sebuah tindakan reaktif saja dikarenakan hal tersebut membutuhkan biaya yang besar untuk kembali membangun fasilitas yang lengkap agar masyarakat mau berpindah. Hal itu didukung oleh pernyataan seorang pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo, yang menggambarkan bahwa pemindahan ibu kota akan mendorong pemerataan pembangunan dan penduduk apabila fasilitas sudah dibangun lengkap. “Bangun infrastrukturnya, masyarakat akan pindah mengejar ‘gula’ yang diciptakan,” (Kompas, 12 September 2013).

##### *c. Catchphrase*

Pada pemberitaan ini, dengan jelas Kompas.com mengatakan bahwa Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritik keputusan SBY untuk memindahkan ibu kota, pada paragraf berita yang diterbitkannya tanggal 10 September 2013 tersebut. Catchphrase yang digunakan oleh Kompas.com disini yaitu dengan menonjolkan bahwa tokoh yang menyampaikan kritik tersebut adalah mantan wakil presiden. “*Mantan Wakil Presiden*

*RI Jusuf Kalla (JK) mengkritik wacana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyebutkan akan memindahkan ibu kota dari Jakarta*” (Kompas, 10 September 2013).

Sebelumnya, dengan judul “*SBY Munculkan Kembali Wacana Pemindahan Ibu Kota*”, disebutkan dengan jelas bahwa Kompas.com menampilkan narasi bahwa apa yang diusulkan SBY adalah suatu hal yang sebelumnya sudah diusulkan, “Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencuatkan kembali isu pemindahan ibu kota.”. Dan dengan gamblang, Kompas.com menyimpulkan bahwa para pengamat menilai apa yang dilakukan SBY hanyalah tindakan reaktif. “Para pengamat menilai lontaran Presiden ini merupakan sikap reaktif saja, dibandingkan memunculkan wacana lama yang sudah digarap lebih baik.” (Kompas, 12 September 2013).

#### *d. Exemplar*

Pada bagian exemplar, yang merupakan bagian dimana bingkai dikaitkan dengan contoh atau teori sebagai penguat dari penjelasan. Exemplar ada pada dikaitkannya antara wacana pemindahan ibu kota dengan realita bahwa di Jakarta segala infrastruktur telah dibangun lengkap berikut dengan fasilitas. Biaya yang dibutuhkan juga tidak sedikit dan juga masih banyaknya permasalahan di Indonesia yang lebih mendesak. Hal ini dikuatkan dengan adanya pernyataan JK pada berita Kompas tanggal 10 September 2013, “Infrastruktur lengkap sudah dibangun disini, masak mau pindah ibu kota? Lebih banyak prioritas lainnya yang harus diselesaikan”.

Narasi mengenai sikap reaktif SBY juga diperkuat dengan pernyataan Andrinof Chaniago, seorang pengamat kebijakan publik, yang dikutip pada pemberitaan Kompas.com tanggal 12 September 2013, pernyataan tersebut kemudian mendapatkan sorotan dari Kompas.com. “Berkunjung ke Istana, lalu memberikan perhatian soal pemindahan ibu kota. Padahal secara substansi tidak ada kemajuan, hanya mengulang ide lama yang masih terbatas,” kemudian disambung dengan “Beberapa tahun lalu, SBY juga sudah pernah memunculkan wacana pemindahan ibu kota, sebagai bagian dari “keprihatinan” atas kondisi Jakarta. Namun tidak pernah ada tindak lanjut dari wacana tersebut.”

#### *e. Depiction*

Pada bagian ini diperlihatkan ungkapan-ungkapan yang digunakan oleh media dalam bentuk istilah-istilah atau ungkapan yang bersifat konotatif. Ada satu kalimat yang menjadi sorotan, yaitu yang ada pada berita Kompas.com, diterbitkan 10 September



2013. Kalimat tersebut merupakan lontaran pertanyaan dari JK terkait wacana pemindahan ibu kota yang dikeluarkan oleh SBY. Namun, pertanyaan ini lebih bersifat mempertanyakan dengan keraguan, dimana pertanyaan itu disertai dengan penjelasan bahwa masih banyak tanggung jawab yang harus diemban dan lebih prioritas.

*f. Roots*

Disini dijelaskan bagian-bagian yang merupakan mengandung unsur sebab-akibat, yang bersangkutan dengan ide sentral. Yang itu berarti memperlihatkan mengapa pada akhirnya, usulan pemindahan ibu kota oleh SBY ini dianggap sebagai sebuah tindakan reaktif. Kalimat pertama, yaitu yang ada pada berita yang terbit tanggal 10 September, dimana JK menganggap bahwa masih banyak hal-hal yang harus diprioritaskan, terlebih lagi fasilitas dan infrastruktur sudah dibangun lengkap di Jakarta. Yang kedua yaitu kalimat pada berita tanggal 12 September, yang menyebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh SBY merupakan tindakan reaktif dan hanya sebuah wacana, karena sebelumnya sudah pernah diusulkan tetapi tidak ada tindak lanjut.

*g. Appeals to Principle*

Pada bagian ini, diketahui adanya klaim-klaim moral yang mendasari atau yang dijadikan sebagai dasar untuk melihat fenomena terkait dengan bingkai. Klaim dasar yang pertama yaitu pernyataan JK mengenai perlunya pertimbangan matang untuk dilakukannya pemindahan ibu kota, termasuk segi historis dari Kota Jakarta itu sendiri. Pernyataan JK ini turut memperjelas bahwa pertimbangan yang dilakukan tidak hanya terkait pada sisi ekonomi sosial politik, melainkan juga dari sisi histori. Disisi lain, Andrinof Chaniago menyatakan bahwa ia menyesalkan tindakan SBY yang mengusulkan ide lama tanpa ada progress hanya karena melihat kesuksesan negara lain dalam memindahkan ibu kotanya.

*h. Consequences*

Disini ditampilkan efek yang didapati dari bingkai yang telah dibuat. Efek tersebut juga diperlihatkan pada berita yang diterbitkan dan telah diulas sebelumnya, yaitu pernyataan dari Agus Pambagyo yang menolak untuk membahas lebih lanjut terkait pemindahan ibu kota, jika hal tersebut hanya sebuah wacana.

### 3.1.2 Pemindahan Ibu Kota oleh SBY adalah Tindakan yang Kurang Tepat dan Terburu-buru

#### a. *Central Idea*

Wacana pemindahan ibu kota yang diusulkan oleh SBY, selain dianggap reaktif, juga beberapa kali dinilai terburu-buru dan kurang tepat. Beberapa tokoh menyatakan menolak untuk menanggapi wacana ini secara serius, dikarenakan, masih dibutuhkan perjalanan yang cukup jauh untuk bisa sampai pada masa yang tepat untuk pemindahan ibu kota. Masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan dan menjadi fokus utama. Seperti yang tertuang pada judul berita pada tanggal 22 Januari 2013, “*Menko Perekonomian Tidak Setuju Ibu Kota Dipindah*”. Dan juga pada tanggal 10 September 2013, yaitu “*Wakil DPRD DKI : Pemindahan Ibu Kota Tepat, tapi Belum Waktunya*”.

#### b. *Metaphors*

Terkait dengan pemindahan ibu kota yang diwacanakan oleh SBY, pada tanggal 12 Agustus 2012, Kompas.com telah merilis satu berita dengan judul “*Pemindahan Ibu Kota “Still Long Way to Go”*”. Judul tersebut dapat dilihat sebagai ungkapan afirmasi terhadap pernyataan yang mengatakan bahwa pemindahan ibu kota adalah satu hal yang masih jauh untuk bisa dicapai. Penggunaan kata “jauh” ini turut menekankan bahwa wacana yang dikeluarkan SBY tersebut merupakan wacana yang kurang tepat untuk direalisasikan pada waktu itu.

Struktur tematik yang tak jauh berbeda juga tertuang pada berita selanjutnya, dengan judul “*Wakil DPRD DKI : Pemindahan Ibu Kota Tepat, tapi Belum Waktunya*”. Dengan gamblang, Kompas ingin menampilkan bahwa pemindahan ibu kota tepat dilakukan namun tidak dalam waktu dekat. Seperti pernyataan yang dikeluarkan oleh Wakil DPRD DKI, Triwicaksana, yaitu jangan sampai dengan adanya pemindahan ibu kota itu, Jakarta dilupakan, seperti pepatah habis manis sepah dibuang.

#### c. *Catchphrase*

Pada bagian ini ditampilkan kalimat atau frase yang menarik untuk disoroti dan memiliki makna lebih dibandingkan yang lain. Bagian pertama yang dapat menarik untuk disoroti adalah pada berita dengan judul “*Wakil DPRD DKI : Pemindahan Ibu Kota Tepat, tapi Belum Waktunya*”. Pada berita tersebut, Kompas.com menjelaskan pernyataan dari Triwicaksana (Wakil DPRD DKI) yang menganggap bahwa pemindahan ibu kota merupakan sebuah solusi yang tepat, namun tidak untuk masa itu.

Lebih jauh lagi, dalam pemberitaan pada tanggal yang sama, yaitu 10 September 2013 dengan judul "*Anggota DPR : Pemindahan Ibu Kota PR untuk Presiden Selanjutnya*", pada awal berita sudah dituliskan bahwa Ignatius Mulyono yang saat itu juga anggota DPR RI mengatakan bahwa pemindahan ibu kota memang diperlukan, tetapi menjadi PR presiden selanjutnya.

Sebelum berkunjung ke Astana, SBY juga pernah mencetuskan wacana pemindahan ibu kota, kurang lebih satu tahun sebelum berkunjung ke Astana. Pada saat itu Kompas.com juga turut mengeluarkan dua berita mengenai wacana tersebut. Berita pertama rilis pada tanggal 28 Agustus 2012, dengan judul "*Pemindahan Ibu Kota 'Still Long Way To Go'*". Ini membuktikan bahwa, bahkan setelah satu tahun wacana tersebut digaungkan, wacana tersebut masih dianggap terlampau jauh, kurang tepat, dan terburu-buru.

d. *Exemplar*

Pada bagian ini, dipaparkan alasan-alasan yang terkait dengan bingkai, ataupun teori-teori yang dapat mendukung penjelasan dari bingkai. Ada satu bagian dari tiap-tiap berita yang kemudian menjadi alasan penguat mengapa pemindahan ibu kota dikatakan merupakan sebuah langkah yang kurang tepat dan terburu-buru. Bagian pertama yaitu pada berita dengan judul "*Wakil DPRD DKI : Pemindahan Ibu Kota Tepat, tapi Belum Waktunya*". Yang menjelaskan bahwa pemindahan ibu kota belum tepat untuk direalisasikan karena dibutuhkan modal yang besar dan persiapan yang matang. Sedangkan sejak tahun 2012 hingga agustus 2013, perekonomian Indonesia berada pada titik krisis, dimana inflasi terus meningkat dibarengi dengan nilai tukar rupiah yang melemah serta cadangan devisa yang terus berkuang (FEB UGM, 2016).

Bagian kedua yaitu pada berita dengan judul "*Anggota DPR : Pemindahan Ibu Kota PR untuk Presiden Selanjutnya*", 10 September 2013. Di dalamnya dipaparkan alasan serupa, yaitu dibutuhkannya persiapan yang matang dan juga karena pada saat itu, presiden memiliki tugas yang harus diprioritaskan menjelang akhir masa jabatannya. Permasalahan yang cukup krusial untuk ditangani pada tahun 2013 adalah pada bidang kesehatan, yaitu adanya fenomena beban gizi ganda, stunting. Sejak tahun 2017 hingga 2013, jumlah balita yang mengalami stunting di Indonesia mengalami peningkatan. Pada 2010, jumlahnya sempat menurun hingga 35,6%, namun kembali meningkat

menjadi 37,2% pada 2013 (Helmyati, S., Atmaka, D. R., Wisnusanti, S. U., & Wigati, 2019).

*e. Depiction*

Di bagian ini, isu-isu digambarkan melalui penggunaan kalimat-kalimat konotatif yang merujuk pada bingkai. Dalam keempat berita yang sudah dilakukan analisis, terdapat tiga kalimat konotatif, pada tiga berita yang berbeda. Kalimat konotatif tersebut wujud dari pengungkapan makna dengan cara yang lebih halus. Kalimat pertama yaitu adanya peribahasa yang digunakan. “Habis manis, sepah dibuang”, dalam konteks kali ini, peribahasa tersebut merujuk sebagai pengingat bahwa dibutuhkan persiapan yang benar-benar matang agar Jakarta tidak ditinggalkan begitu saja, setelah ibu kota yang baru berhasil dibangun.

Kalimat kedua yaitu kata “radikal”. Secara kontekstual, radikal dalam hal ini dapat dimaknai bahwa wacana pemindahan ibu kota dengan cara membangun ibu kota baru di daerah lain adalah suatu wacana yang terlampau jauh. Sejalan dengan hal tersebut, pada kalimat ketiga, yaitu sebuah kutipan dari ucapan Hatta Rajasa. “Kalau mau bicara soal wacana, soal pusat pemerintahan, ya silakan saja. Wacana itu baik untuk dikembangkan”, ucapan tersebut juga sebuah kalimat pengingat, bahwa ketika ia menolak wacana pemindahan ibu kota oleh SBY, ia juga mengingatkan bahwa wacana tersebut akan lebih baik jika disertai dengan upaya pengembangan.

*f. Roots*

Di bagian ini, dipaparkan analisis kausal kontekstual, yang merujuk pada bingkai. Hubungan sebab-akibat diperlihatkan sebagai penguat alasan mengapa bingkai tersebut ditampilkan. Keempat berita yang menjadi rujukan analisis bingkai tersebut, masing-masing terdapat kohesi dan koherensi dalam menyampaikan pola sebab-akibat mengapa pada akhirnya, wacana pemindahan ibu kota oleh SBY adalah langkah yang terburu-buru dan kurang tepat.

Pola yang pertama, menunjukkan bahwa wacana tersebut tidak didukung karena beberapa sebab seperti dibutuhkannya persiapan yang benar-benar matang, dibutuhkannya modal yang besar padahal Indonesia sedang mengalami krisis, dan juga adanya problematika yang lebih mendesak. Jika pemerintah bertekad untuk memindahkan ibu kota pada waktu dekat, maka biaya yang harus terkuras akan lebih banyak.

Aspek-aspek lain seperti masih adanya bencana yang terjadi, bersifat lebih urgen dan juga mendesak, daripada harus memindahkan ibu kota.

*g. Appeals to Principle*

Disini, diperlihatkan klaim-klaim moral yang berkaitan dengan bingkai. Klaim moral yang nampak terdapat pada paparan dari satu berita berjudul “*Anggota DPR : Pemindahan Ibu Kota PR untuk Presiden Selanjutnya*”. Dijelaskan bahwa ide untuk melakukan pemindahan ibu kota sudah terpikirkan oleh SBY sejak lama, namun ia hanya diam saat muncul berbagai pemikiran dan debat wacana. Baginya, di Indonesia sudah menjadi budaya, ketika ada sebuah ide baru, maka akan diperdebatkan dan disalahkan.

*h. Consequences*

Efek yang muncul dari adanya bingkai tersebut adalah diusulkannya beberapa alternatif lain. Mulai dari memikirkan dan memprioritaskan masalah lain yang lebih mendesak, hingga adanya usulan untuk tetap memilih melakukan pembenahan terhadap Jakarta, daripada harus dilakukan pemindahan ibu kota. Karena hal tersebut akan membutuhkan biaya dan modal yang besar. Baik dari segi ekonomi, social, maupun politik.

### 3.1.3 Pemindahan Ibu Kota oleh Jokowi adalah Langkah Tepat

*a. Central Idea*

Berbeda dengan wacana pemindahan ibu kota yang diusulkan oleh SBY yang dinilai merupakan sebuah langkah reaktif dan terburu-buru, pemindahan ibu kota oleh Jokowi dinilai merupakan langkah yang tepat. Beberapa tokoh nasional menyatakan bahwa pemindahan ibu kota oleh Jokowi ini merupakan langkah yang tepat karena mampu mengurangi beban Jakarta sebagai ibu kota negara. Hal ini juga turut didukung dengan adanya langkah-langkah nyata yang diambil oleh pemerintahan Jokowi, yang meliputi desakan pembuatan RUU pemindahan ibu kota dan pembahasan lebih lanjut mengenai regulasinya.

*b. Metaphors*

Pada tanggal 28 Agustus 2019, Kompas.com merilis satu berita terkait dengan tanggapan para mantan Gubernur DKI, yaitu Anies Baswedan, Sutiyoso, Ahok, dan Djarot. Sutiyoso menganggap bahwa pemindahan ibu kota akan mengurangi “beban” Jakarta.

Bentuk dukungan juga dipublikasikan oleh Kompas.com dalam berita berjudul *“Buka HPN 2020, Jokowi Kembali Tegaskan Ibu Kota Baru Tak Akan Rusak Lingkungan”*, dimana Kompas.com menyatakan bahwa Kalimantan Selatan adalah salah satu daerah yang “menggaungkan diri” sebagai “pintu gerbang” ibu kota baru.

c. *Catchphrase*

Frase yang menarik untuk disoroti pada bagian ini salah satunya terlihat pada berita yang dikeluarkan pada tanggal 17 Agustus 2019, yang berjudul *“Prabowo Sebut Pemindahan Ibu Kota Bagian dari Perjuangan Gerindra”*. Berita ini menjadi menonjol karena Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, dengan terbuka menyatakan bahwa pemindahan ibu kota adalah bagian dari perjuangan Gerindra. Yang berarti, ia secara terbuka juga berusaha meyakinkan para pendukungnya bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi, adalah apa yang memang diusahakan oleh Gerindra.

Dukungan lain juga nampak pada kalimat yang ada pada berita dari Kompas.com pada tanggal 28 Agustus 2019. Sutiyoso yang merupakan mantan gubernur DKI Jakarta, mengatakan bahwa pemindahan ibu kota akan meringankan beban Jakarta, termasuk masalah-masalah sulit seperti kemacetan dan kekumuhan. Optimistis pemerintah terhadap progress pemindahan ibu kota juga nampak dari berita yang dikeluarkan oleh Kompas.com pada tanggal 26 Agustus 2019, dengan judul *“Ketua Komisi II Optimistis Regulasi Pemindahan Ibu kota Selesai 2019-2024”*.

d. *Exemplar*

Alasan-alasan mengenai pemindahan ibu kota oleh Jokowi yang dinilai tepat, dapat dilihat dari beberapa kalimat yang terdapat pada beberapa berita yang dirilis oleh Kompas.com. Pada berita dengan judul *“Prabowo Sebut Pemindahan Ibu Kota Bagian dari Perjuangan Gerindra”*, Said Abdullah yang merupakan anggota Badan Anggaran DPR, mengatakan bahwa pemindahan ibu kota merupakan langkah serius karena telah disampaikan pada pidato kenegaraan dan di sidang paripurna MPR.

Pemindahan ibu kota oleh Jokowi juga dinilai tepat karena Jakarta selama ini, tidak hanya menanggung beban sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga pusat perdagangan, ekonomi, dan pariwisata. Untuk itu, memindahkan ibu kota dari Jakarta dinilai dapat meringankan beban Jakarta. Pun dengan persiapannya, pemindahan ibu kota ini telah melalui berbagai macam tahapan termasuk analisis beban lingkungan di daerah yang akan dibangun ibu kota baru.

e. *Depiction*

Pada bagian ini terdapat dua kalimat bermakna konotatif yang ada pada satu berita dengan judul “*Bappenas Bantah Pemindahan Ibu Kota Hanya untuk Kepentingan Pemilu*”, yang dirilis pada tanggal 11 Februari 2020. Dalam berita tersebut, dijelaskan bahwa sebelumnya, seorang Kepala Departemen Advokasi Eksekutif Nasional Walhi, Zenzi Suhadi mengatakan bahwa ia meragukan konsep ibu kota negara yang sebelumnya telah dipaparkan oleh Bappenas. Ia juga mengatakan bahwa ia mengetahui rencana pemindahan ibu kota tersebut saat pemilu, dan baru diumumkan pada saat itu juga. Kemudian itu dibantah oleh Bappenas. Ini menunjukkan bahwa langkah yang diambil oleh Jokowi untuk memindahkan ibu kota negara, bukanlah sebuah langkah yang “ditunggangi” untuk kepentingan politik saja, melainkan memang sudah direncanakan secara matang sejak jauh hari.

f. *Roots*

Terkait dengan alasan sebab-akibat, mengapa pemindahan ibu kota oleh Jokowi dipandang sebagai langkah tepat adalah, pemindahan ibu kota dinilai sebagai solusi atas kesulitan yang terjadi di Jakarta, seperti kemiskinan, kumuh, kemacetan, bahkan musibah banjir. Pemindahan ibu kota ini terkait dengan rencana pertumbuhan di daerah baru, dimana diharapkan, ibu kota tidak lagi menanggung beban berat, karena pusat pemerintahan telah dipindahkan.

Hal tersebut juga nampak menonjol dikarenakan pada saat pemberitaan pemindahan ibu kota oleh SBY, pada judul berita, Kompas.com menyebutkan bahwa itu sebuah “wacana”, sedangkan pada berita-berita terkait dengan pemindahan ibu kota oleh Jokowi, cenderung disebutkan bahwa itu adalah sebuah “rencana”.

g. *Appeals to Principle*

Klaim moral nampak pada salah satu berita yang dikeluarkan pada tanggal 8 Februari 2020, dengan judul “*Prabowo Sebut Pemindahan Ibu Kota Bagian dari Perjuangan Gerindra*”. Dalam berita tersebut, Jokowi mengatakan bahwa ibu kota tidak hanya sebagai simbol identitas bangsa, melainkan juga simbol kemajuan suatu bangsa. Dengan kata lain, dalam mewujudkan pusat pemerintahan yang lebih baik, demi meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara dilakukan dengan cara memindahkan ibu kota negara dari Jakarta.

#### h. *Consequences*

Efek yang muncul dan diperlihatkan pada bingkai tersebut adalah pemerintah diminta untuk segera mengusulkan RUU mengenai pemindahan ibu kota beserta dengan rencana anggaran yang sudah dirincikan. Kalimat itu tertera pada berita dengan judul “*Prabowo Sebut Pemindahan Ibu Kota Bagian dari Perjuangan Gerindra*”, 8 Februari 2020.

#### 3.1.4 Tindak Lanjut Pemindahan Ibu Kota oleh Jokowi sebagai Bentuk Keseriusan Pemerintah Membangun Ibu Kota Baru

##### a. *Central Idea*

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa keseriusan Jokowi dalam melakukan pemindahan ibu kota negara, juga termasuk melakukan tahap pembangunan ibu kota baru. Hal ini dimulai dari pemilihan daerah yang dijadikan sebagai lokasi ibu kota baru, menyusun Panitia Khusus, menyusun Undang-Undang, hingga merencanakan konsep untuk ibu kota yang baru. Tentu ini semua merupakan representasi dari keseriusan Jokowi yang pada awalnya memicu pertanyaan karena pemerintah masih menutup rapat tentang lokasi untuk ibu kota baru. Beberapa kepala daerah, secara terbuka mengatakan bahwa mereka telah menyiapkan lahan jika kelak daerah mereka terpilih sebagai lokasi ibu kota baru. Ini merupakan wujud dukungan absolut pada keputusan Jokowi dalam rencananya memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta.

##### b. *Catchphrase*

Bagian yang menarik dan cukup menonjol untuk disoroti terdapat pada salah satu berita, yang dirilis pada tanggal 7 Mei 2019, dengan judul “*Provinsi-provinsi Ini Siap Sediakan Lahan untuk Pemindahan Ibu Kota*”. Judul tersebut sudah cukup jelas menggambarkan bahwa sebagai bentuk dukungan kepada keputusan Jokowi untuk memindahkan ibu kota, beberapa provinsi menyatakan siap untuk menyediakan lahan di daerah mereka untuk dijadikan lokasi ibu kota baru. Dukungan lain yang nampak menonjol dan menarik juga ditunjukkan pada berita yang dirilis pada tanggal 16 September 2019, dengan judul “*DPR Bentuk Pansus Pengkajian Pemindahan Ibu Kota*”. Dalam berita tersebut, Kompas.com memberitakan bahwa DPR RI akan membentuk Panitia Khusus terkait dengan rencana pemindahan ibu kota oleh pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Zainudin Amali, Ketua Komisi II DPR RI.



### c. *Exemplar*

Ada beberapa paparan yang dapat menguatkan bingkai bahwa pemindahan ibu kota oleh Jokowi telah disertai dengan tindakan lanjut sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mendukung kebijakan tersebut. Paparan yang pertama datang dari berita yang rilis pada tanggal 16 September 2019, oleh Kompas.com. Di dalamnya, Kompas.com menerangkan bahwa Jokowi telah menyerahkan surat beserta lamporan-lampirannya ke DPR untuk kemudian ditindak lanjuti.

Selain dibentuk Panitia Khusus, sebuah badan otoritas juga akan dibentuk. Dalam berita yang terbit pada tanggal 15 November 2019 tersebut, dijelaskan bahwa badan tersebut akan dipimpin oleh seorang profesional yang posisinya netral, yang mana ini berarti pemerintah berusaha meyakinkan masyarakat bahwa badan tersebut akan terbebas dari adanya politik kepentingan.

### d. *Roots*

Analisis kausal sebab-akibat terkait bingkai ini terlihat pada beberapa kalimat yang ada pada beberapa berita yang telah diterbitkan oleh Kompas.com. Kalimat pertama adalah kalimat yang terdapat pada berita yang diterbitkan oleh Kompas.com pada tanggal 7 Mei 2019, dengan judul "*Provinsi-provinsi Ini Siap Sediakan Lahan untuk Pemindahan Ibu Kota*". Pada berita tersebut, disampaikan bahwa meskipun lokasi ibu kota baru masih ditutup-tutupi, beberapa kepala daerah dengan gamblang menyatakan sudah siap untuk menyediakan lahan sebagai lokasi ibu kota baru.

Kedua, kalimat penjelasan mengenai mengapa DPR akhirnya membentuk Pansus untuk mengawal langkah pemindahan ibu kota. Hal tersebut dikarenakan Presiden Jokowi telah terlebih dahulu mengirim lampiran dan surat-surat ke DPR. Sehingga, untuk menindaklanjuti surat tersebut, mereka membentuk Pansus.

Ketiga, yaitu penjelasan mengenai pembentukan badan otoritas yang merupakan sebuah respons dari pemerintah untuk menyikapi adanya isu-isu yang menyangkut dengan pemindahan ibu kota (Kompas.com, 15 November 2019).

Yang terakhir adalah penjelasan mengenai pemilihan konsep ibu kota baru yang telah dipilih. Dalam berita yang beredar pada tanggal 11 Februari 2020 ini disebutkan bahwa konsep tersebut dipilih karena konsep sudah disesuaikan dengan kondisi lingkungan Pulau Kalimantan yang memiliki karakteristik hutan hujan tropis dan berbagai ecological constraint.

### 3.2 Pembahasan

Isu pemindahan ibu kota negara sebetulnya sudah ada sejak masa pemerintahan Soekarno. Isu tersebut juga hadir di setiap masa pemerintahan tiap presiden, bahkan hingga SBY dan Jokowi. Pada masa pemerintahan SBY, kabar tersebut muncul sejak Desember 2009 dan kembali mencuat pada bulan Agustus 2013. Hal ini tentu menyita banyak perhatian publik dan juga media. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, media berperan untuk menyampaikan perkembangan terbaru mengenai apa yang sedang terjadi kepada masyarakat (Budyatna dalam Setiawan, 2011). Setelah lokasi ibu kota baru ditetapkan oleh Jokowi, hashtag #IbuKotaBaru menjadi salah satu trending di Twitter. Kurang lebih 12000 orang menggunakan hashtag tersebut dengan berbagai respon. Berita tentang pemindahan ibu kota masih terus bergulir hingga tahun 2020 ini (Sindonews.com, 2019).

Gambaran ini sangat berbeda dengan saat pemindahan ibu kota diagendakan oleh SBY. Hanya ada beberapa berita di Kompas.com yang dirilis terkait pemindahan ibu kota oleh Mantan Presiden Indonesia ke-6 tersebut. Padahal, pemindahan ibu kota yang direncanakan keduanya sama-sama masih belum matang. SBY dan Jokowi sama-sama membutuhkan waktu untuk bisa membuktikan pada public seperti apa langkah seperti apa yang kemudian harus dilakukan setelah mengutarakannya pada public. Sama halnya dengan Jokowi, SBY pun sempat membentuk tim khusus sebagai tindak lanjut.

Namun meskipun begitu, bingkai berita yang dilakukan oleh media pada kedua peristiwa yang serupa nyatanya sangat berbeda. Pada dasarnya, setiap media memang memiliki perspektif dan kemampuan sendiri untuk merepresentasikan suatu peristiwa. Mereka dapat memilih mana bagian yang harus ditampilkan, ditonjolkan, atau dihilangkan (Sukri & Yesicha, 2017).

Dari *research* yang telah dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa Kompas.com adalah salah satu media online yang pada tahun 2019 dipimpin oleh Budiman Tanuredjo, yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Pemimpin Umum, yang juga merupakan seorang warga asli Solo. Sama halnya dengan Jokowi yang juga merupakan warga asli Solo. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa aspek proksimitas seperti kepemilikan latar belakang yang sama, cenderung memiliki penilaian yang sama terhadap suatu hal (Morissan, 2013). Hal tersebut menjadi bukti pendukung bahwa

Kompas.com dan Jokowi memiliki latar belakang yang sama. Yaitu sama-sama berasal dari Surakarta atau Solo.

Sisi positif dari Jokowi cenderung dominan ditampilkan, dan berbanding terbalik dengan sisi negatif yang dimiliki Jokowi (Putera, 2014). Sedangkan pada tahun tersebut, SBY masih menjabat sebagai presiden dan telah menjabat dalam dua periode berturut-turut, adalah seorang Ketua Umum Partai Demokrat. Partai Demokrat juga turut dalam pemilihan lembaga legislatif pada 2014. Pada tahun tersebut, menjelang akhir periode kepemimpinannya, SBY dicitrakan sebagai seorang yang curang oleh Kompas.com, terkait dengan isu SBY menggunakan fasilitas negara untuk kampanye (Jemat, 2014). Sedangkan di tahun sebelumnya, pada saat SBY mendapatkan penghargaan “World Statesmen Award” pada tahun 2013, Kompas.com mencitrakan SBY sebagai sosok yang seharusnya melakukan evaluasi dan ia dinilai kurang memiliki rasa toleransi (Luhukay, 2015).

Independensi media adalah sikap media yang tidak berpihak pada siapapun kecuali pada kebenaran yang harus ditampilkan kepada masyarakat dan tidak dalam pengaruh atau tekanan dari siapapun (Khotimah, 2019). Pada penelitian yang dilakukan oleh Akbar Bakhtiar pada tahun 2019 dengan judul “Representasi Ideologi Melalui Piranti Linguistik Dalam Wacana Berita Elit Politik Di Kompas.Com (Kajian Analisis Wacana Kritis Fairclough)” memberikan hasil bahwa Kompas.com dalam memberitakan beberapa tokoh elit politik menjelang pemilu 2019 tidak sepenuhnya netral.

#### **4. PENUTUP**

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kompas.com dalam memberitakan satu peristiwa yang serupa yaitu pemindahan kota oleh presiden, yang dilakukan oleh dua kepala negara yang berbeda dalam periode berbeda, memiliki perspektifnya sendiri. Kompas.com cenderung lebih berpihak pada Jokowi. Terbukti dari adanya bingkai yang juga berbeda ditunjukkannya melalui teks-teks yang dihasilkan oleh mereka.

Mulai dari kuantitas berita yang dihasilkan, pada masa pemindahan ibu kota oleh SBY, kuantitas berita lebih sedikit dibandingkan saat pemindahan ibu kota dilakukan oleh Jokowi. Pemilihan kata yang digunakan pun juga berbeda, yaitu menggunakan kata “wacana” pada masa SBY, dan “rencana” pada masa Jokowi. Padahal keduanya, SBY

dan Jokowi, sama-sama belum memiliki konsep matang saat menyatakan keinginannya untuk memindahkan ibu kota. Keduanya sama-sama memerlukan waktu untuk bisa menindak lanjuti gagasan mereka.

Bingkai berita yang dihasilkan pun juga berbeda. Pada masa SBY, dominan dituturkan bahwa pemindahan ibu kota adalah sikap reaktif dan hanya wacana lama, dan ditampilkan opini dari para elit politik yang menolak gagasan tersebut. Berbeda dengan masa Jokowi, pemindahan ibu kota dinilai sebagai langkah tepat, dan dominan mendapatkan dukungan dari para elit politik. Hal ini membuktikan bahwa Kompas.com, sebagai media cenderung berpihak pada gagasan pemindahan ibu kota yang dikeluarkan oleh Jokowi daripada gagasan pemindahan ibu kota oleh SBY.

## DAFTAR PUSTAKA

- Carter, M. J. (2013). The Hermeneutics of frames and framing: An examination of the media's construction of reality. *SAGE Open*, 3(2), 1–12. <https://doi.org/10.1177/2158244013487915>
- Damayanti, I. (2011). Wajah Soeharto Dalam Infotainment ( Analisi Framing Tabloid Cek & Ricek Dalam Pemberitaan Soeharto). *Journal Komuniti*, 1(1), 31–38.
- Helmyati, S., Atmaka, D. R., Wisnusanti, S. U., & Wigati, M. (2019). *STUNTING: Permasalahan dan Penanganannya*. UGM PRESS.
- Khotimah, N. (2019). TANTANGAN INDEPENDENSI MEDIA DALAM PEMILU: KASUS KOMPAS.COM. *Islamic Communication Journal*, 4(2), 133–145.
- Kriyantono, R. (2006). *Teknik Praktis Riset komunikasi - Rachmat Kriyantono, S.Sos., M.Si - Google Books*. Kencana Prenada Media Group.
- Luhukay, M. (2015). *SBY IMAGING ON ONLINE NEWS MEDIA NEWS FRAMING ANALYSIS OF THE AWARDING OF WORLD STATESMAN AWARD TO THE PRESIDENT OF INDONESIA*. [https://www.researchgate.net/publication/276919186\\_SBY\\_IMAGING\\_ON\\_ONLINE\\_NEWS\\_MEDIA\\_NEWS\\_FRAMING\\_ANALYSIS\\_OF\\_THE\\_AWARDING\\_OF\\_WORLD\\_STATESMAN\\_AWARD\\_TO\\_THE\\_PRESIDENT\\_OF\\_INDONESIA\\_SUSILO\\_BAMBANG\\_YUDHOYONO\\_ON\\_METROTVNEWS\\_COM\\_AND\\_KOMPASCOM](https://www.researchgate.net/publication/276919186_SBY_IMAGING_ON_ONLINE_NEWS_MEDIA_NEWS_FRAMING_ANALYSIS_OF_THE_AWARDING_OF_WORLD_STATESMAN_AWARD_TO_THE_PRESIDENT_OF_INDONESIA_SUSILO_BAMBANG_YUDHOYONO_ON_METROTVNEWS_COM_AND_KOMPASCOM)
- Morissan. (2013). *Teori Komunikasi Massa*. Ghalia Indonesia.
- Parton. (2008). Book Reviews 823. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*, 38(4), 823–824.
- Putera, E. G. (2014). *Bingkai Media Terhadap Pemberitaan Capres Jokowi Pada*

*Pilpres 2014 ( Analisis Framing Media Online Kompas . com dan Detik . com ) Skripsi Disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan Strata 1 Penyusun Nama NIM : Ghanes Eka Putera. 2014.*

- Putra, M. S. (2012). Konstruksi Realitas Sosial atas Peristiwa Ambruknya Jembatan Kutai Kartanegara. *Jurnal ULTIMA Comm*, 4(2), 55. <https://doi.org/10.31937/ultimacomm.v4i2.207>
- Setiawan, aria aditya. (2011). PERAN MEDIA MASSA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS KEPEMERINTAHAN LOKAL BERBASIS HUMAN SECURITY DI KOTA JAYAPURA Aria Aditya Setiawan. *Jurnal Ilmu Politik*, 2(2). <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/5096>
- Sodikin, A. (2018). KONSTRUKSI PEMBERITAAN PARTAI DEMOKRAT DI MEDIA MASSA (Analisis Framing Pernyataan Pakar Komunikasi Politik di Kompas.com). *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 17(2), 351–378.
- Sukri, A., & Yesicha, C. (2017). Analisis Framing Berita Di Surat Kabar Riau Pos Dan Tribun Pekanbaru. *Jurnal Komunikasi Global*, 6(2), 220–238. <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JKG/article/view/9333>
- Sulaiman, A. (2016). Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger. *Society*, 4(1), 15–22. <https://doi.org/10.33019/society.v4i1.32>